**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Akuntansi**

**2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), terdapat pengertian akuntansi yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Samryn (2011:3), sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi ke pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus ditulis.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27), definisi akuntansi adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

**2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi**

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. **Akuntansi Manajemen**,yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencenaan operasi di masa depan.
2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntantan publik.
5. **Akuntansi pajak**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transkasi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

**2.1.1.3 Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2012:22), laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:26) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka angka dalam satuan moneter.”

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

c. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhitisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang tejadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu

i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;

ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;

iii. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Menurut Dwi Martani (2015:383), laporan arus kas merupakan satu dari lima laporan keuangan ideal yang disusun perusahaan. Laporan ini menunjukkan detail asal usul perubahan kas awal dan saldo kas akhir perusahaan, yang dapat dibaca pada laporan keuangan komparatif. Selain itu, laporan arus kas juga melengkapi informasi laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan mengamankan kas. Laporan laba rugi yang berbasis akrual tidak dapat memastikan bahwa seluruh pendapatan (dan laba bersih) telah diterima dalam bentuk kas oleh perusahaan.

**2.1.2 Arus Kas**

**2.1.2.1 Pengertian Arus Kas**

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:17), kas ialah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:2.2), arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas.

Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.

**2.1.2.2 Pengertian Laporan Arus Kas**

Setiap perusahaan memberikan informasi arus kas yang akan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kekampuan perusahaan untuk mengelola dana dari keuangan tersebut.

Laporan arus kas menunjukkan suatu proses pergerakan dana tunai masuk dan keluar dari suatu perusahaan yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode. Laporan arus kas tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan kas dimasa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada bagi perusahaan didalam membuat perencanaan dan peramalan kebutuhan kas (*cashflow*) dimasa yang akan datang.

Menurut Dwi Martani (2015:396), laporan arus kas adalah:

“Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk meganalisis daya tahan dan *sustainability* perusahaan. Selain itu laporan arus kas dapat menunjukkan kondisi ideal kas yang seharusnya dimiliki perusahaan, berdasarkan tahap perkembangan perusahaan.”

Laporan arus kas menunjukkan perubahan posisi nilai kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai akibat adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode tertentu dan laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.

**2.1.2.3 Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas**

Menurut Dwi Martani (2015:383), tujuan laporan arus kas adalah:

“Laporan arus kas bertujuan menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas dari suatu entitas selama satu periode langsung.”

Secara rinci, laporan arus kas ini membantu para pengguna laporan keuangan, terutama kreditur dan investor dalam menganalisis:

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan kas;
2. Kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajiban dan membayar dividen tunai;
3. Kemampuan entitas untuk mendanai ekpansi dan investasi;
4. Kemampuan entitas untuk memperoleh kas dari aktivitas operasional dan keterkaitannya denga laba (rugi) entitas.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.3), tujuan laporan arus kas adalah melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**2.1.2.4 Klasifikasi Laporan Arus Kas**

Menurut Dwi Martani (2015:384), secara umum laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yang merupakan karakteristik transaksi kas perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi (*Operating Activities*), merupakan transaksi-transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan dalam laba rugi. Karena transaksi operasional ini sifatnya jangka pendek, akun-akun utama dalam aset lancar nonkas dan liabilitas lancar juga terkait dengan arus kas aktivitas operasi.

2. Aktivitas Investasi (*Investing Activities*), merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan perubahan aset nonlancar, termasuk investasi dan aset-aset tak berwujud.

3. Aktivitas Pendanaan (*financing activities*), merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.3), arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
2. Penerimaan kas dari royalti, *fees,* komisi dan pendapatan lain;
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
4. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;
6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitus) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; dan
7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan.

Menurut Dwi Martani (2015:384), mengklasifikasikan beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Arus Kas Masuk:

* Penerimaan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan.
* Penerimaan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan dividen dari investasi ekuitas yang dimiliki.

Arus Kas Keluar:

* Pembayaran kepada pemasok (supplier) atas persediaan.
* Pembayaran gaji kepada karyawan.
* Pembayaran pajak kepada pemerintah.
* Pembayaran bunga kepada kreditur.
* Pembayaran beragam beban operasional.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.3), dinyatakan bahwa jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis adalah berguna, hubungannya dengan informasi lain, dalam memprakirakan arus kas operasi masa depan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.4), entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

1. Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau
2. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung.

Sebagai alternatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat disajikan berdasarkan metode tidak langsung dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode.

PSAK Nomor 2 Tahun 2015 paragraf 33-34, menyatakan bahwa bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Akan tetapi bagi entitas lain belum ada kesepakatan mengenai kualifikasi arus kas ini. Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba dan rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi. Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu pengguna untuk menentukan kemampuan entitas membayar dividen dari arus kas operasi.

Menurut Toto Prihadi (2011:207), arus kas operasi secara normatif adalah positif. Perusahaan yang tidak mengalami masalah operasional, yaitu laba dan modal kerja, arus kas operasinya positif.

Aliran kas operasi merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas yang berkaitan dengan penghasil utama pendapatan perusahaan atau suatu entitas (Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016). Saputro (2011) dalam Salsabiila dkk., (2016) menyatakan bahwa besarnya jumlah arus kas operasi dapat dilihat pada laporan arus kas yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dan diskala dengan total aset yang berada pada neraca.

PreTax Cash Flow = Jumlah arus kas operasi

Total Aset

**2.1.3 Perpajakan**

**2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20012 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut P.J.A. Andiani dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

**2.1.3.2 Jenis-jenis Pajak**

Dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya, antara lain:

1. Munurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
2. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
5. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
6. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
7. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
8. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
9. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

**2.1.4 Akuntasi Keuangan (Akuntansi Komersial)**

Pengertian Akuntansi Keuangan menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:29):

“Akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal.”

Informasi akuntansi keuangan dikomunikasikan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan dan dibatasi oleh beberapa ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan yang disusun ini untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perushaaan untuk menilai prestasi manajer atau dipake manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap pemegang saham.

**2.1.5 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10), akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komesial disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

**2.1.6 Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi keuangan (komersial) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan akuntansi pajak (fiskal) tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Keterkaitan akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan jika dilihat melalui laporan keuangan dari sisi pembukuan, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut akan terbagi dalam perbedaan permanen dan temporer yang pada akhirnya memerlukan sebuah penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan oleh akuntansi komersial (perusahaan) dan akuntansi fiskal (pemerintah).

Waluyo (2014:35), mengemukakan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Akuntansi Keuangan** | **Akuntansi Perpajakan** |
| **Dasar Penyusunan** | Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | Undang-undang Perpajakan |
| **Konsep** | 1. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*propermatching cost and revenue*) 2. Konservatisme digunakan 3. Materialitas digunakan | a. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (*propermatching taxable income and deductible expense*)  b. Konservatisme tidak digunakan  c. Materialitas tidak digunakan |
| **Akibat Penyimpangan** | Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan. | Dikenakannya sanksi dibidang perpajakan, antara lain: sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan penjara. |
| **Masa Manfaat** | 1. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun teknis 2. Ditelaah ulang secara periodik 3. Nilai residu bisa diperhitungkan | a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan  b. Nilai residu tidak bisa diperhitungkan |
| **Harga Perolehan** | 1. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya 2. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan nilai wajar 3. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas 4. Aktiva sumbangan berdasarkan nilai pasar | a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya  b.Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar  c.Untuk transaksi tukar menukar adalah harga pasar  d.Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan Menteri Keuangan  e.Revaluasi keuangan adalah sebesar nilai setelah revaluasi |
| **Metode Penyusutan** | 1. Garis lurus 2. Jumlah angka tahun 3. Saldo menurun/menurun berganda 4. Metode jam jasa 5. Unit produksi 6. Anuitas 7. Sistem persediaan 8. Wajib pajak dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodek | a. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus  b.Untuk aktiva tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. |
| **Sistem Penyusutan** | Penyusutan secara individual kecuali peralatan kecil, boleh secara golongan | a. Penyusutan individual  b. Penyusutan golongan/grup |
| **Saat Dimulainya Penyusutan** | 1. Saat perolehan 2. Saat penyelesaian | a. Saat Perolehan  b.Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian |

**2.1.7 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Menurut Resmi (2014:399) menjelaskan bahwa laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak

Menurut Pohan (2014:421), terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. Perbedaan Tujuan Laporan

Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar besarnya penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.

2. Perbedaan Orientasi Pelaporan

Pelaporan keuangan disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (*judgement*)sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konsevatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan *under-stated*agar laporan tampak *low profile*. Laporan fiskal, umunya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.

3. Perbedaan Konsep/Prinsip Akuntansi

Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Materialitas

Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan. Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehan tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

1. Konservatisme

Akuntansi menggunakan konsep konservatis, yakni mengakui kerugian yang akan timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan nilai persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (*lower of cost or market*). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyisihan/cadangan untuk dibiayakan kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya”.

Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda kearah itu. Ketentuan perpajakan bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

1. Prinsip Realisasi Dalam Penetapan Biaya (*cost*) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda karena:

* Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya *deductible.* Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (*cost*), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
* Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat-alat pertanian dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan.
* Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar *force of attraction,*secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.

1. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009. Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi daripada bentuk formal /hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis.

1. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode Penilaian Persediaan

pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (*Average Method*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.

b. Metode Pencadangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1c UU PPh yakni:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan usaha badan lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang;

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha Pertambangan;

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri , yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan.

c. Metode Penghapusan Piutang

Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1h UU PPh.

d. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tidak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:

1. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi

Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan yakni:

* Metode garis lurus (*staight line method*)
* Metode saldo menurun (*declining balance method*)
* Metode saldo menurun berganda (*double declining balance method*)
* Metode jumlah angka tahun (*sum of the year’s digits method*)
* Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
* Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
* Metode anuitas (*anuity method*), dan lain-lain.

Sedangkan dalam fiskal:

* Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah:

1. Metode garis lurus (*staight line method*) dan Metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud nonbangunan.
2. Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.

* Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.

2. Perbedaan masa manfaat/umur ekonomis

Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/harta berwujud, sedangkan dalam akuntansi fiskal masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi harta tak berwujud.

3. Nilai Residu

Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.

5. Perbedaan Perlakuan

1. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany devidend*, pembebasan utang dan penghasilan BUT karena atribusi *force of attraction*.
2. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penhasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
3. Pemberian *relief* atau keringanan yang lain, misalnya laporan laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
4. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha.

**2.1.** **8 Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (*Book Tax Differences*)**

Menurut Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti (2016) *Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Menurut Djamaluddin (2008:64) dalam Rachmat (2016) *book tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal

Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial merupakan pelaporan laba yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi), sedangkan laporan laba rugi fiskal dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal.

Menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015, Laba akuntansi yaitu laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut IAI dalam PSAK 46 tahun 2015, laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).

Menurut Resmi (2014:369), penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan salah satunya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan keadaan finansial. Laporan keuangan perusahaan selain ditujukan untuk kepentingan pemegang saham juga ditujukan untuk kepentingan perpajakan, sehingga untuk perhitungan pajak perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal. Standar yang mengatur keuangan fiskal adalah peraturan perpajakan, sedangkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya penghitungan perbedaan laba rugi perusahaan. Perbedaan itu lah yang menimbulkan istilah *book-tax differences* dalam analisis perpajakan.

Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2005 dalam Djamaluddin dkk., 2008). Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya *book tax differences* peneliti menggunakan rasio yang sama dengan Rachmat (2016) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal dipreoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

Laba Akuntansi - Laba Fiskal

Total Aset

**2.1.9 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal**

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya.

Menurut Pohan (2014:418), mendefinisikan rekonsilasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan tersebut dikelompokkan secara umum kedalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:239), Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*—Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.

4. Penyusutan fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak—Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final—Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.

4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.

5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

6. Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Perbedaan permanen timbul karena adanya pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundaang-undangan Perpajakan. Perbedaan permanen dan perbedaan temporer inilah yang merupakan pembentuk *book tax differences.* Hal itu dikarenakan kedua komponen tersebut merupakan penyebab timbulnya perbedaan antara laba akuntansi atau penghasilan sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

**2.1.9.1 Perbedaan Permanen**

Edy Suprianto (2011:133), mendefinisikan perbedaan permanen sebagai berikut:

“Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.”

Resmi (2014:403), mendefinisikan perbedaan tetap sebagai berikut:

“Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.”

Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:238), mendefinisikan perbedaan permanen sebagai berikut:

“Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP (*taxable income*)”

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final—Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

2. Penghasilan yang bukan objek pajak—Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

3. pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran—Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

4. beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.

5. penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.

6. Sanksi Perpajakan.

**2.1.9.2 Perbedaan Temporer**

Edy Suprianto (2011:140), mendefinisikan perbedaan temporer sebagai berikut:

“Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.”

Resmi (2014:403), mendefinisikan perbedaan temporer sebagai berikut:

“Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba.”

Sukrisno Agoes (2013:238), mendefinisikan perbedaan temporer sebagai berikut:

“beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.”

Beda temporer biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal:

1. akrual dan realisasi;

2. penyusutan dan amortisasi;

3. penilaian persediaan;

4. kompensasi kerugian fiskal.

Perbedaan temporer atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam satu periode (Deviana, 2010 dalam Lestari, 2011).

**2.1.10 Persistensi Laba**

**2.1.10.1 Pengertian Laba**

Salah satu fungsi akuntansi adalah melakukan pengukuran termasuk pengukuran prestasi, hasil usaha, laba maupun posisi keuangan. Pengukuran laba ini bukan saja penting untuk menuntukan prestasi perusahaan, tetapi juga penting sebagai informasi pembagian laba, penentuan kebijakan investasi, pembayaran pajak, zakat, bonus, dan pembagian hasil.

Sofyan Safri Harahap (2011:300) pengertian laba adalah sebagai berikut:

“Laba (rugi) adalah penghasilan dikurangi biaya, di mana definisi penghasilan dan biaya diatur oleh standar akuntansi.”

Laba adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Di sisi lain akuntansi mendefinisikan laba dari sudut pandang sebagai satu kesatuan. Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tertentu.

Dalam metode *historical cost* (biaya historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode masing-masing diukur dengan biaya historis sehingga hasil akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya.

Dalam penelitian ini, laba akuntansi yang dimaksud adalah laba akuntansi menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015, yaitu laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut IAI dalam PSAK 46 tahun 2015 laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).

Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya membedakan penghasilan menjadi dua yaitu penghasilan yang merupakan obyek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dibedakan menjadi dua yaitu, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Selain itu peraturan pepajakan membedakan beban menjadi dua, yaitu beban yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*) dan beban yang tidak boleh dikurangkan (*nondeductible expenses*) dalam penghitungan fiskal.

Pengelompokkan penghasilan dan beban oleh peraturan perpajakan mengakibatkan laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal. Dalam rangka menghitung laba fiskal perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi sebelum pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penyeseuaian terhadap laba akuntansi ini dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal.

**2.1.10.2 Kualitas Laba**

Salah satu tujuan penyajian laporan keuangan yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi, seharusnya laba yang disajikan merupakan laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas ditunjukkan oleh kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomik. Kualitas laba sering dikaitkan dengan perekayasaan laba (*earnings management*), karena laba yang telah mengalami perkeyasaan akan menurunkan kualitasnya (Suwardjono, 2010 dalam Salsabiila dkk., 2016).

Irfahn Fahmi (2012:321), mendefinisikan perekayasaan laba sebagai berikut:

“*Earnings management* (perekayasaan laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba dengan dikehendakinya oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*).”

Sedangkan Rahmawati (2012:11), menyatakan bahwa manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan khusus.

Laba akuntansi berkualitas adalah laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsian yang tentunya labanya tidak dimanipulasi atau terbebas dari *discretionary accruals*. Semakin kecil manipulasi laba akan menyebabkan laba menjadi semakin berkualitas. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah (Jang, 2007 dalam Nurul 2016).

**2.1.10.3 Pengertian Persistensi Laba**

Salah satu komponen dari kualitas laba adalah persistensi laba. Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (*expected future earnings*) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan (Djamaluddin, 2008 dalam Nurul 2016).

Menurut Penman dan Zhang (1999), dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti, (2016), persistensi laba adalah:

“Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*).”

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:40), persistensi laba adalah:

“Revisi laba yang mencerminkan kualitas laba perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu.”

Selain itu Penman (2001) dalam Wijayanti (2006), menyatakan bahwa Persistensi laba merupakan:

“Revisi laba yang diharapkan di masa depan (*expected future earnings*) yang diimplikasikan melalui laba tahun berjalan (*curremt earnings*). Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba.”

Persistensi laba mengandung unsur predictive value sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Persada (2010) dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset. Apabila persistensi laba (PRST) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan *high* persisten , apabila persistensi laba (PRST) > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, apabila persistensi laba (PRST) ≤ 0 berarti laba perusahaan tidak persisten dan fluktuatif. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang persisten memiliki karakteristik bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan jumlah laba sepanjang tahun dan adanya perubahan atau revisi laba pada tahun berikutnya dimana laba tersebut meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang memiliki laba tidak persisten memiliki karakteristik laba perusahaan yang tidak konsisten dan berfluktuatif setiap tahunnya.

PRST = Laba sebelum pajakt-1 – Laba sebelum pajakt

Total Aset

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi tentang suatu entitas yang mencerminkan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga berfungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Salah satu penilaian kinerja perusahaan adalah dengan melihat laba.

Laba merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahan yang baik tercemin pada laba yang berkualitas. Pengelompokkan konstruk kualitas laba dan pengukurannya menurut Schipper dan Vincent (2003) berdasarkan sifat runtun waktu dari laba, kualitas laba meliputi persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi) dan variabilitas.

Persistensi laba merupakan ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai satu perioda masa depan, atau persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) dan merupakan nilai prediktif yang tercermin dalam komponen akrual dan aliran kas.

Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui arus kas yang mengklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama periode akuntansi. Aliran kas operasi adalah suatu proksi untuk melihat berapa kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba dalam pengoperasiannya. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar aktual.

Selain itu laba dipengaruhi oleh pajak yang dalam penghitungannya melibatkan laba kena pajak atau yang biasa disebut laba fiskal, besar kecilnya pajak kini ditentukan oleh jenis transaksi yang terjadi. Pengakuan transaksi- transaksi tersebut ada yang diakui dan tidak diakui oleh fiskal. *Book tax differences* juga dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi adanya praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba dapat mempengaruhi kualitas laba dan persistensi dari laba perusahaan tersebut.

Penelitian ini menghubungkan *book tax differences* dan aliran kas operasi dengna persistensi laba, dengan variabel dependen menggunakan persistensi laba yang dapat dilihat dari nilai perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini yaitu *book tax differences* dan aliran kas operasi.

Dari pemaparan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh *Book Tax Differences* Terhadap Persistensi Laba**

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi *stakeholder* untuk membantu pengambilan keputusan. Laporan laba rugi menyediakan informasi mengenai hasil kegiatan perusahaan selama periode berjalan menjadi salah satu komponen laporan keuangan utama yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder.* Laporan laba rugi ini sering dijadikan tolok ukur kinerja suatu perusahaan (Martini dan Persada, 2009).

Laporan laba rugi akan bermanfaat jika memenuhi kualifikasi *relevance* dan *reliable*. Namun tidak jarang perusahaan melakukan manipulasi laba dalam melaporkan labanya, sehingga mengakibatkan kualitas laba rendah dan laba kurang persisten. Laba yang dimanipulasi tersebut tentunya menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan (Wijayanti, 2006).

Manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan untuk pelaporan pajak berdasarkan peraturan perpajakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar penghitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak.

*Book tax differences* dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba serta bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Logika yang mendasarinya adalah adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran penghasilan kena pajak, sehingga *book tax differences* dapat memberikan informasi tentang *management disrection* dalam proses akrual (Wiajayanti,2006).

Menurut Djamaluddin (2008:56) perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book tax differences*) dapat memberikan informasi tentang *management disrection acruall*. Persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediktif laba, oleh karena persistensi laba merupakan unsusr relevansi, maka beberapa informasi dalam *book tax differences* yang dapat mempengaruhi persistensi laba dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan.

Dengan adanya koreksi fiskal maka akan terjadi perbedaan yang diantaranya perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Dewi (2014) menyatakan bahwa penghitungan laba secara fiskal dan akuntansi akan berbeda ketika beda tetap atau permanen yang harus dikurangkan dalam akuntansi tetapi tidak dikurangkan dalam pajak mengakibatkan beda permanen bertambah dan diikuti persistensi yang positif juga.

Menurut Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) menyatakan bahwa *book tax differences* dengan perbedaan permanen pada rekonsiliasi fiskal dengan koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang dan jumlah pajak terutang juga berkurang, sehingga apabila pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin sedikit, sedangkan jumlah penghasilan sebelum pajak diasumsikan tetap maka laba bersih setelah pajak akan besar, dengan kata lain pertumbuhan laba juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan yang positif terhadap persistensi laba. Sehingga apabila *book tax differences* dengan perbedaan permanen bertambah maka perusahaan semakin persisten atau dapat meningkatkan laba.

Untuk itu *book tax differences* dengan perbedaan permanen menyebabkan laba perusahaan persisten dan dapat memprediksi laba pada tahun berikutnya, karena perbedaan permanen tidak menyebabkan perbedaan yang begitu besar (Salsabiila, Pratomo dan Nubaiti, 2016).

Ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. (Lestari, 2011) perbedaan ini yang menyebabkan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal bertambah maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan maka semakin kecil laba yang dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal bekurang sehingga beban pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil membuat laba bersih menjadi semakin besar. Hal ini yang dapat mempengaruhi persistensi laba suatu perusahaan.

Sloan (1996) dalam Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan temporer yang besar cenderung memiliki laba yang tidak persisten. Nilai koefisien negatif adalah dampak dari pembalikan atas perbedaan temporer di masa yang akan datang sehingga perbedaan temporer memiliki hubungan negatif terhadap persistensi laba.

Perbedaan temporer atau waktu disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan (Lestari, 2011). Penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminology pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martani dan Persada, 2009).

Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal atau laba sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, misalnya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan aset pajak tangguhan (Lestari, 2011). Pada saat timbulnya kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan menyebabkan perusahaan melakukan restitusi dan masih harus membayar pajak yang tertangguh hal ini menyebabkan laba menjadi berkurang atau bertambah, sehingga mempengaruhi persistensi laba.

Apabila beban pajak tangguhan besar, maka jumlah beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayarkan juga akan lebih besar karena beban pajak tangguhan ini akan menambah beban pajak kini yang akan menambah jumlah pajak pengahasilan semakin besar. Dengan asumsi penghasilan tetap dan jumlah pajak terutang yang dibayarkan besar, maka laba bersih (laba fiskal) akan semakin kecil dan pertumbuhan laba perusahaan akan menurun. Untuk itu perbedaan temporer akan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba, atau perbedaan temporer menyebabkan laba perusahaan tidak persisten dan dapat memprediksi laba pada tahun berikutnya, karena perbedaan temporer menyebabkan penundaan pada pengakuannya (Salsabiila, Pratomo dan Nubaiti, 2016).

**2. Pengaruh Aliran Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi tentang suatu entitas yang mencerminkan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui arus kas yang mengklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama periode akuntansi. Aliran kas operasi adalah suatu proksi untuk melihat berapa kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba dalam pengoperasiannya. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan sehingga aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar aktual.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.3) arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba rugi. Aliran kas operasi juga mencerminkan banyaknya kas yang dikeluarkan untuk beroperasi dengan kata lain memperoleh laba. Apabila kas operasi berjumlah positif maka akan menyumbangkan laba dan begitu sebaliknya. Aliran kas operasi juga dianggap sebagai faktor utama dalam menetukan persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

Menurut Wijayanti (2006) persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediksi laba dalam menentukan kualitas laba. Persistensi laba tersebut ditentukan oleh komponen akrual dalam aliran kas dari laba sekarang yang mewakili sifat transitori (sementara atau peralihan) dan permanen laba.

Sifat transitory dan permanen dari persistensi laba umumnya ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas yang tercermin dalam laba saat ini (Diana dan Indra, 2004). Nasir dan Ulfah (2008) menyatakan bahwa Persistensi laba akan meningkat apabila komponen aliran kas semakin meningkat. Kondisi inilah yang membuat aliran kas operasi disebut sebagai proksi kualitas laba, yang dalam hal ini kualitas laba akan semakin baik seiring semakin tingginya aliran kas operasi terhadap laba.

Nurul Septavita (2016) menyatakan bahwa banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut.

Arus kas operasi menunjukkan kinerja operasi perusahaan dan kualitas laba yang dihasilkan. Semakin tinggi arus kas operasi mengindikasikan bahwa perusahaan memberikan kinerja yang baik, dan diharapkan akan memberikan laba yang baik di masa datang.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2015:5) mengungkapkan terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan

Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

Menurut Resmi (2014:399) terdapat perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan yang mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan adanya Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial menurut Resmi (2014:399) ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2014:399) ditujukan untuk menghitung pajak yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut Dwi Martani (2015:384), secara umum laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yang merupakan karakteristik transaksi kas perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1.Aktivitas Operasi

2. Aktivitas Investasi

3. Aktivitas Pendanaan

Laba Komersial

Laba Komersial Menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015 yaitu laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Laba Fiskal

Laba Fiskal Menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015 yaitu laba atau rugi selama suatu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).

**Faktor yang berkaitan dengan laba pada laporan keuangan**

Aliran Kas Operasi

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2.3)

Nurul Septavita (2016)

*Book Tax Differences*

Resmi (2014:399)

Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016)

Persistensi Laba

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Book Tax Differences* dan Aliran Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba**

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan hipotesis:

H1 : *Boox tax differences* berpengaruh terhadap persistensi laba.

H2 : Aliran kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba.